

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2016

NOMOR : 1

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA CILEGON**

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembagian wilayah objek pemeriksaan aparat internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon, perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi jumlah objek pemeriksaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
6. Wilayah objek pemeriksaan adalah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

7. Inspektorat ...

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cilegon;
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Cilegon;
9. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV pada Inspektorat Kota Cilegon;
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan;
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi;
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang didalamnya memuat : waktu pelaksanaan pengawasan, jumlah hari pengawasan, jumlah pengawas dan jumlah laporan hasil pengawasan.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 2

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 18 (delapan belas) SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Dinas Pekerjaan Umum ;
 2. Dinas Perhubungan;
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Dinas Pendidikan;
 6. Dinas Tata Kota ;

7. Kantor ...

7. Kantor Pemadam Kebakaran;
 8. Bagian Perlengkapan;
 9. Bagian Pengendalian Program;
 10. Kecamatan Cibeber;
 11. Kecamatan Citangkil;
 12. Puskesmas Cibeber;
 13. Puskesmas Citangkil;
 14. SMPN 2;
 15. SMPN 5;
 16. SMPN 6;
 17. SMAN 1 ;
 18. SMKN 3.
- (3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 3

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 18 (delapan belas) SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 2. Badan Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 4. BPTPM;
 5. Dinas Kesehatan ;
 6. RSUD;
 7. BAPPEDA;

8. Kantor ...

8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Bagian Hukum;
 10. Kecamatan Ciwandan;
 11. Kecamatan Purwakarta ;
 12. Puskesmas Ciwandan;
 13. Puskesmas Purwakarta;
 14. SMPN 3 ;
 15. SMPN 7 ;
 16. SMPN 8 ;
 17. SMAN 2 ;
 18. SMAN 4.
- (3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 4

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 21 (dua puluh satu) SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Dinas Tenaga Kerja;
 2. Dinas Sosial;
 3. PT. PCM;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
 5. Sekretariat DPRD ;
 6. Badan Kepegawaian dan Diklat ;
 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

8. Bagian ...

8. Bagian Umum;
 9. Bagian Keuangan ;
 10. Kecamatan Grogol ;
 11. Kecamatan Cilegon ;
 12. Puskesmas Grogol ;
 13. Puskesmas Cilegon ;
 14. SMPN 4 ;
 15. SMPN 10;
 16. SMPN 11 ;
 17. SMAN 3 ;
 18. SMKN 1;
 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 20. PANWAS;
 21. KORPRI.
- (3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 20 (dua puluh) SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian dan Kelautan ;
 2. Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM CM);
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 5. Dinas ...

5. Dinas Kebersihan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 8. Bagian Komunikasi dan Informasi ;
 9. Bagian Pemerintahan;
 10. Bagian Organisasi;
 11. Kecamatan Jombang ;
 12. Kecamatan Pulomerak;
 13. Puskesmas Jombang;
 14. Puskesmas Pulomerak ;
 15. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 16. SMPN 1 ;
 17. SMPN 9 ;
 18. SMAN 5 ;
 19. SMKN 2 ;
 20. SMKN 4.
- (3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Kelima

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 6

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), dan pasal 5 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat perubahan pembagian wilayah yang insidental, diatur langsung oleh inspektur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA CILEGON,

ttd

SUYITNO

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 1